

Strategi Peningkatan Partisipasi Keluarga Berencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Strategies for Increasing Family Planning Participation in Mentawai Island

Henri Prianto Sinurat

Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Lembaga Administrasi Negara
Jl. Kiara Payung KM 4,7 Jatinangor Sumedang, Jawa Barat
Email: henrisinurat@yahoo.co.uk

Ervina Yunita, Rati Sumanti

Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara
Jl. DR. Mr. Teuku Haji Muhammad Hasan, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar
Email: yina.mat04@gmail.com

Naskah diterima tanggal 26 Desember 2022. Naskah direvisi tanggal 30 Desember 2022.
Naskah disetujui tanggal 31 Desember 2022.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi peningkatan partisipasi keluarga berencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penelitian ini telah memetakan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penerapan program KB. Tantangan yang dihadapi Petugas KB di Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi wilayah kerja berbentuk kepulauan, terbatasnya akses transportasi, terbatasnya jumlah sumber daya manusia, serta belum terbukanya masyarakat adat terhadap program KB. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis SWOT, teknik pengumpulan data melalui wawancara, telaah dokumen dan observasi, sehingga diperoleh informasi strategi peningkatan partisipasi keluarga berencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tujuannya agar ditemukan strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menerapkan program KB. Strategi yang dilakukan adalah kaderisasi Program KB, penerapan inovasi Bona Keren Jelita, pelibatan tokoh masyarakat adat dalam program KB.

Kata Kunci: partisipasi; program keluarga berencana; daerah kepulauan; mentawai

Abstract

This study aims to examine strategies for increasing family planning participation in the Mentawai Islands District. This research has mapped the challenges faced by the Mentawai Islands District Government in implementing the KB program. The challenges faced by

family planning officers in the Mentawai Islands Regency include work areas in the form of islands, limited access to transportation, limited number of human resources, and the fact that indigenous peoples are not open to the family planning program. This study uses qualitative methods with SWOT analysis, data collection techniques through interviews, document review and observation, so that information on strategies to increase family planning participation in the Mentawai Islands District is obtained. The goal is to find strategies to overcome existing problems so as to increase community participation in implementing family planning programs. The strategy taken is the regeneration of the KB program, the application of Bona Keren Jelita innovations, the involvement of traditional community leaders in the KB program.

Keywords: *participation; family planning programs; island regions; Mentawai*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan program KB mempunyai beragam tantangan di daerah. Menurut Pasrah, faktor penghambat keberhasilan program KB diantaranya adalah rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh instansi terkait pelaksanaan program keluarga berencana ([Pasrah, Rosa; Putro, Tri Sukirno; Indrawati, 2014](#)). Dalam penelitian ([Nurjannah & Susanti, 2018](#)) juga ditemui kendala dalam implementasi program KB, selain pemberdayaan yang kurang, faktor pemahaman serta antusias masyarakat juga memberikan peran penting dalam keberhasilan program tersebut. Banyak orang yang menyadari manfaat dari layanan keluarga berencana, tetapi mereka mengeluh kesulitan untuk mengakses layanan keluarga berencana karena fasilitas kesehatan yang disediakan berada jauh dari rumah mereka ([Marrone et al., 2014](#)). Oleh karenanya, integrasi antar pihak perlu dilakukan, tidak hanya kepada masyarakat sebagai penggunaan program keluarga berencana tetapi juga kepada fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan dan jasa tindakan KB bagi masyarakat ([Amalini, 2019](#)).

Jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menghambat laju pembangunan di berbagai bidang, oleh karena itu upaya mengatasi permasalahan ledakan penduduk tersebut, pemerintah Indonesia telah menerapkan program Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia.

Jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2016 adalah 86.981 jiwa. Pada tahun 2017 jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkat menjadi 88.692 jiwa. Penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2018 ada sebanyak 90.373 jiwa (BPS Mentawai). Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, pemerintah telah menetapkan beberapa program seperti pemerataan penduduk melalui

program transmigrasi, pemerataan lapangan kerja, penerapan program Keluarga Berencana, penetapan batas usia minimal pernikahan. Program Keluarga Berencana merupakan salah satu program yang didorong untuk diterapkan dan menjadi salah satu fokus pada Nawacita Presiden Republik Indonesia.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat merilis berita pada tahun 2016 bahwa pencapaian KB di Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya mencapai 38,90 persen dan menjadi pencapaian terendah di Sumatera Barat. Berada di wilayah terluar Provinsi Sumatera Barat dengan wilayah berbentuk kepulauan menyebabkan proses penyelenggaraan program KB menjadi terkendala. Desa di pulau-pulau masih sangat sulit dijangkau karena minimnya alat transportasi laut. Jarak antar pulau juga turut menghambat kelancaran sosialisasi program KB. Untuk menjangkau setiap daerah dibutuhkan waktu dan biaya operasional yang besar. Terbatasnya alat transportasi membuat petugas PLKB juga membutuhkan waktu yang lama dalam melaksanakan sosialisasi KB. Sehingga akses ke layanan Keluarga Berencana menjadi terhambat. Peran dari petugas pelayanan KB sangat bergantung pada kondisi dan cuaca pelayaran. Permasalahan lainnya adalah fasilitas kesehatan yang masih sangat kurang di desa-desa. Terbatasnya fasilitas yang dimiliki oleh petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) tentunya menghambat pelaksanaan program KB di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Belum semua masyarakat di Mentawai mengetahui informasi mengenai program KB. Hal ini yang menyebabkan masyarakat Mentawai tidak mau menerima program KB. Minimnya pengetahuan akan informasi KB membuat masyarakat beranggapan bahwa program KB akan membatasi jumlah keturunan. Sementara program KB adalah program dari pemerintah yang mengatur jarak kelahiran, mengatur usia yang tepat untuk bersalin dan mewujudkan keluarga berkualitas. Tantangan lainnya adalah belum utuhnya pengetahuan kader dan petugas lapangan tentang program KB. Kader dan petugas lapangan masih kekurangan literasi di bidang kesehatan keluarga berencana. Hal ini disebabkan karena masih belum mencukupinya kebutuhan 1 desa dengan 1 petugas PLKB. Terbatasnya jumlah petugas telah menghambat penyebaran informasi program KB di masyarakat. Kurangnya jumlah petugas juga menghambat proses pelayanan KB secara menyeluruh ke masyarakat. Dibutuhkan strategi khusus untuk mengurangi dampak permasalahan yang ada. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus memikirkan strategi atau cara yang paling tepat dan

efektif untuk mengkomunikasikan tentang perencanaan keluarga kepada masyarakat. Sehingga upaya-upaya ini akan meningkatkan kesehatan masyarakat itu sendiri.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut WHO dalam ([Sulistyawati, 2013](#)), program KB merupakan tindakan untuk membantu pasangan suami istri memperoleh tujuannya seperti mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur jarak kehamilan, mengatur jumlah anak serta menghindari kelahiran yang tak diinginkan ([Sulistyawati, 2013](#)). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, program KB bertujuan untuk mengatur jarak usia anak, mengatur usia yang tepat untuk bersalin, serta mengatur kehamilan melalui promosi dan perlindungan, memberikan bantuan sesuai hak reproduksi guna mewujudkan keluarga berkualitas.

Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya yaitu memberikan pelayanan publik ([Suharsono, 2013](#)). Penerapan program KB oleh pemerintah merupakan implementasi kebijakan publik di Indonesia. Namun dalam prakteknya tentu masih ditemui resistensi daerah terhadap program keluarga berencana. Resistensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bukan bertujuan untuk membangkang terhadap program nasional tersebut, akan tetapi, hanya karena pemerintah daerah punya program lain yang lebih urgen harus diselesaikan dibandingkan program KB yang sudah “ditangani” langsung oleh pemerintah pusat. bentuk penolakan pemerintah daerah terhadap program KB diwujudkan dalam bentuk yang sangat halus seperti penganggaran program KB yang sangat minim, hanya sekitar 1% dari keseluruhan APBD. Hal ini tentu tidak sebanding dengan banyak kegiatan yang harus dilakukan dalam mendukung mega-program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, sehingga tentu, jumlah anggaran yang hanya 1% tersebut tidak mencukupi ketika harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring program KB ([Bunu & Windia, 2018](#)).

Untuk menjaga kualitas implementasi kebijakan publik maka diselenggarakanlah evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan sebuah metode dalam rangka memperbaiki pelaksanaan program KB. Evaluasi kebijakan sebagai suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya,

dan metode analisisnya ([Setiawan, 2013](#)). Berdasarkan dari evaluasi tersebut, maka pemerintah akan mendapatkan strategi dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Setiap Lembaga/Instansi Pemerintahan membutuhkan strategi dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi. Secara etimologis (asal kata) strategi dalam manajemen sebuah organisasi diartikan sebagai kiat, cara, dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan organisasi ([Nawawi, 2014](#)).

Secara konseptual strategi sering diartikan dengan beragam pendekatan ([Mardikanto, Totok; Soebiato, 2013](#)). Salah satu pendekatan yang ada adalah “Strategi sebagai kegiatan, strategi merupakan upaya-upaya yang dilakukan setiap individu, organisasi, atau perusahaan untuk memenangkan perusahaan persaingan, demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau telah ditetapkan. Strategi secara umum diartikan sebagai cara atau alat untuk mencapai tujuan secara lebih baik dan cepat ([Sjafrizal, 2009](#)). Strategi adalah suatu tindakan yang berpengaruh dan sangat menentukan keberhasilan terhadap program atau kegiatan, baik yang akan maupun yang telah direncanakan oleh pihak manajemen ([Makmur, 2009](#)). Strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi, strategi juga adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi ([Allison, 2013](#)).

Di era persaingan global, sangat dibutuhkan pengembangan ide-ide baru dan inovasi pada organisasi sektor publik. Pelayanan pemerintah pada sektor publik harus mampu bersaing dengan pelayanan sektor swasta. Hadirnya persaingan teknologi dan informasi juga turut berdampak pada kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pemerintah Daerah harus mampu menyelesaikan permasalahan KB atau akan mendapat persepsi kurang baik dari masyarakat Mentawai.

Sentuhan inovasi dapat diterapkan dalam penerapan sebuah strategi sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Strategi inovasi dalam pemerintahan meliputi:

- a. Layanan terintegrasi, dimana sektor publik menawarkan peningkatan sejumlah layanan, warga memiliki harapan yang tidak sederhana dimana warga meminta layanan yang disediakan disertai dengan kenyamanan.
- b. Desentralisasi pemberian dan monitoring layanan lebih dekat dengan masyarakat dan biasanya membentuk kepastian terhadap tingkat permintaan yang tinggi sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat atau pelaku bisnis.

- c. Pemanfaatan kerjasama, bermakna sebagai pemerintahan yang inovatif untuk memenuhi peningkatan pemenuhan agar lebih efisien dalam pemberian layanan publik, lebih kolaboratif antar organisasi dan juga terjadi kerjasama antara publik dan swasta.
- d. Pelibatan warga Negara. Kewenangan pemerintah yang Inovatif harus merealisasikan peran-peran pentingnya dengan mendorong peran warga untuk berpartisipasi dalam mendorong perubahan.
- e. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi ([Sangkala, 2013](#)).

Di beberapa daerah, Kampung KB menjadi program inovatif dan strategis dalam mewujudkan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga di masyarakat. Alasan dari program strategis dan inovatif ini mengandung makna bahwa Kampung KB adalah ujung tombak dari pembangunan yang menyasar langsung kepada masyarakat. Pembangunan ini tentunya melibatkan segenap sektor yang terdapat di dalam masyarakat baik itu formal maupun informal. Oleh karena agenda tersebut menjadi alasan kuat apabila pembangunan kependudukan dimulai dari wilayah pinggiran yaitu kampung, karena kampung merupakan cikal bakal terbentuknya desa. Secara lebih jauh apabila pembangunan pada seluruh kampung maju, maka desa juga maju, apabila seluruh desa maju maka akan menjadi pendorong suatu wilayah dalam suatu negara akan menjadi maju ([Widya Saputra et al., 2019](#)).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memperoleh hasil penelitian yang dibutuhkan. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang didasarkan pada teks dan *image* data, memiliki langkah analisis yang unik dan digambarkan dalam desain yang beragam ([Cresswell, 2014](#)). Teks dan *image* data merupakan data hasil serangkaian proses wawancara untuk mendapatkan informasi tentang strategi peningkatan partisipasi Keluarga Berencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sehingga peneliti bisa memiliki penilaian yang subyektif terhadap setiap data yang diperoleh dari hasil wawancara. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk mendapatkan formulasi strategi peningkatan partisipasi Keluarga Berencana. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*) ([Rangkuti, 2014](#)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan dan Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan program nasional pemerintah dalam rangka mengurangi laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, Program KB mempunyai empat dimensi, yaitu dimensi pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, peningkatan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan. Dalam penerapan dimensi-dimensi tersebut, Program KB menghadapi berbagai macam tantangan terutama di daerah kepulauan. Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah berbentuk kepulauan. Kondisi daerah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Program KB.

Tantangan tersebut disebabkan karena petugas PLKB membutuhkan waktu, tenaga dan anggaran biaya yang lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya. Hanya tersedia transportasi laut dan penerbangan perintis yang dapat menghubungkan Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan ibukota Provinsi Sumatera Barat. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada kualitas koordinasi BKKBD Provinsi dan PMDP2KB Kabupaten. Bentuk kepulauan juga membuat pelaksanaan tugas PLKB bergantung pada kondisi alam. Jika sedang berada dalam kondisi cuaca buruk dan badai besar, sudah dapat dipastikan bahwa proses pelayanan akan terhambat. Hal ini juga didorong oleh terbatasnya jumlah fasilitas dan sumber daya manusia yang menjadi *operator* transportasi laut yang dimiliki oleh PMDP2KB Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Terbatasnya jumlah SDM menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program KB di Mentawai. Kabupaten Kepulauan Mentawai belum memenuhi kebutuhan 1 orang penyuluh KB untuk setiap 1 desa, meskipun setiap desa sudah mempunyai kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD. Akan tetapi belum semua petugas PPKBD dan sub PPKBD mampu menyampaikan informasi mengenai program KB secara utuh kepada masyarakat. Petugas PLKB harus mempunyai kemampuan dalam hal komunikasi dengan masyarakat. Program KB merupakan bagian dari kegiatan penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan sebagai sarana penyampaian informasi dan konsultasi tentang Keluarga Berencana.

Dalam Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan (*International Conference on Population and Development*) yang diselenggarakan di Kairo Tahun 1994 menandai adanya pergeseran paradigma pembangunan di bidang pengendalian

pertumbuhan penduduk menjadi lebih ke arah pendekatan reproduksi dengan memperhatikan hak-hak reproduksi. Dengan pendekatan ini penanganan bidang kependudukan dan keluarga berencana menjadi lebih luas, tidak hanya aspek penurunan fertilitas tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi individu, termasuk hak-hak reproduksi, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan serta tanggung jawab dan partisipasi laki-laki/ suami dalam kaitannya dengan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Pada saat ini masih banyak kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah yang belum peka gender, termasuk dalam hal implementasi kebijakan pembangunan keluarga berencana.

Untuk menghadapi masyarakat adat Mentawai, dibutuhkan kemampuan khusus petugas PLKB terutama dalam penggunaan bahasa daerah. Petugas PLKB juga harus mempunyai kemampuan dalam hal pendekatan secara persuasif terhadap masyarakat. Selain kemampuan komunikasi, seorang petugas PLKB harus mempunyai ketahanan tubuh dalam menjalankan tugas terutama ketika menyambangi daerah pelosok dan pulau-pulau kecil. Petugas PLKB juga harus mempunyai kemampuan dasar dalam mengoperasikan alat transportasi laut.

Tantangan lain dalam pelaksanaan program KB di Mentawai adalah minimnya pengetahuan masyarakat akan manfaat dari KB itu sendiri. Masyarakat masih beranggapan bahwa KB akan menghambat peningkatan jumlah keturunan. Sementara masyarakat masih mempunyai pemikiran bahwa sampai saat ini, masih dibutuhkan tenaga manusia dalam pengelolaan lahan di Mentawai yang masih sangat luas. Masyarakat di Mentawai masih sangat mempercayai informasi yang disampaikan oleh *Sikerei* (Dukun di Mentawai), jika program KB belum disampaikan oleh *Sikerei* maka program tersebut tidak akan menjadi prioritas yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Terbatasnya anggaran juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan program KB di Mentawai. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor penyebab minimnya kegiatan sosialisasi program KB. Sosialisasi sejatinya dapat merubah pemahaman masyarakat sehingga akan tertarik pada program KB. Mayoritas masyarakat di Mentawai masih beranggapan bahwa program KB bertujuan untuk membatasi jumlah anak. Sementara program KB bertujuan untuk mengatur jarak kelahiran anak.

Analisis SWOT

Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan merupakan faktor internal yang berasal dari PMDP2KB Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penyelenggaraan tugas meningkatkan partisipasi Keluarga Berencana. Faktor-faktor kekuatan internal yang dimiliki PMDP2KB Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen aparatur dalam penyelenggaraan program KB.
Aparatur tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas, pokok dan fungsi pelayanan KB untuk masyarakat.
2. Adanya dukungan dari pimpinan.
Kepala PMDP2KB dan jajaran Pimpinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai turut mendukung penyelenggaraan KB di masyarakat. Kepala Daerah beserta jajaran juga kerap menyampaikan pentingnya Program KB dalam pertemuan dengan masyarakat.

Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan merupakan faktor internal yang berasal dari PMDP2KB Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penyelenggaraan tugas meningkatkan partisipasi Keluarga Berencana. Faktor-faktor kelemahan internal yang dimiliki PMDP2KB Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan
Keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan Program KB di Mentawai. Hal ini dipengaruhi oleh geografis daerah yang berbentuk kepulauan, sehingga dibutuhkan dana operasional yang lebih besar ketimbang daerah lainnya.
2. Terbatasnya jumlah SDM
Kabupaten Kepulauan Mentawai belum mampu memenuhi kebutuhan 1 orang penyuluh KB untuk setiap 1 desa. Hal ini akan menghambat proses sosialisasi dan pelaksanaan program KB di masyarakat.

Peluang (*Opportunities*)

Peluang merupakan faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh PMDP2KB Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penyelenggaraan tugas meningkatkan partisipasi Keluarga Berencana. Faktor-faktor peluang eksternal yang dimiliki PMDP2KB Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:

1. Adanya diklat dan bimtek

Aparatur penyelenggara program KB mendapatkan program pelatihan, diklat maupun bimbingan teknis yang diselenggarakan instansi pusat maupun daerah.

2. Adanya pengembangan kompetensi

PMDP2KB Kabupaten Kepulauan Mentawai menyelenggarakan pengembangan kompetensi untuk aparturnya melalui cara *coaching* dan *mentoring*. Pengalaman-pengalaman dari pelaksana tugas yang telah lebih dulu bekerja menjadi ilmu bagi aparatur yang baru saja bekerja. Adanya *mentoring* juga menjadi metode evaluasi dalam pelaksanaan kerja.

3. Pembaharuan (*updating*) SOP, SP

Adanya perkembangan masyarakat membuat peraturan yang berlaku juga mengalami perubahan. Demikian juga dengan adanya pembaharuan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan. Pembaharuan peraturan membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih teratur dan terukur.

Ancaman (*Threat*)

Ancaman merupakan faktor yang berasal dari eksternal dan sulit dikendalikan oleh PMDP2KB Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penyelenggaraan tugas meningkatkan partisipasi Keluarga Berencana. Faktor-faktor peluang eksternal yang dimiliki PMDP2KB Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:

1. Kondisi geografis dan cuaca yang berbeda setiap musim.

Kabupaten Kepulauan Mentawai berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Perubahan iklim dunia turut mempengaruhi perubahan cuaca di Mentawai. Perubahan cuaca yang tidak menentu sangat mengganggu pelaksanaan program KB yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Ombak besar dan badai menjadi penyebab tertundanya pelaksanaan program KB di lapangan.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana

Kabupaten Kepulauan Mentawai belum mempunyai Pos Penyuluhan KB secara merata di setiap desa. Penyuluhan KB dilaksanakan di Puskesmas, Balai Desa, maupun di permukiman masyarakat.

3. Pandangan masyarakat yang belum menerima program KB

Masyarakat Mentawai sebagian masih belum menerima keberadaan program KB. Mereka menyatakan bahwa dengan mengikuti Program KB akan mengurangi jumlah keturunan. Sementara Masyarakat Adat Mentawai masih membutuhkan banyak orang

untuk mengelola lahan pertanian dan kelautan. Pandangan masyarakat seperti ini menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan KB di Mentawai.

Tabel 1.
Ringkasan Matriks SWOT

Kekuatan (<i>Strength</i>)			Kelemahan (<i>weakness</i>)		
- Adanya komitmen aparatur dalam penyelenggaraan program KB (S1) - Adanya dukungan dari pimpinan (S2)			- Terbatasnya anggaran yang dialokasikan (W1) - Terbatasnya jumlah SDM (W2)		
Peluang (<i>Opportunities</i>)		Strategi SO		Strategi WO	
- Adanya diklat dan bimtek (O1) - Adanya pengembangan kompetensi (O2) - Pembaharuan (updating) SOP, SP (O3)		- Meningkatkan kualitas pelayanan KB (S1, O1, O2, O3) - Menambahkan jadwal kunjungan / konsultasi KB (S2)		- Meningkatkan kapasitas aparatur penyuluh KB (W1, O1, O3) - Menambahkan kader relawan KB (W2, O2).	
Ancaman (<i>threat</i>)		Strategi ST		Strategi WT	
- Kondisi geografis dan cuaca yang berbeda setiap musim. (T1) - Terbatasnya sarana dan prasarana (T2) - Pandangan masyarakat yang belum menerima program KB (T3)		- Menambah media sosialisasi KB (S1, T1, T2) - Melakukan pendekatan persuasif terhadap Sikerei (Ketua Adat) untuk penerapan KB (S2, T3)		- Menyediakan Boat Pelayanan milik Pemkab. (W1, W2, T1, T2) - Melakukan sosialisasi secara intensif (T3)	

Sumber: diolah oleh penulis

Formulasi Strategi

Formulasi strategi yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Strategi S-O

- Meningkatkan kualitas pelayanan KB. Dinas PMDP2KB Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai aparatur yang baik dan berkomitmen dalam pelayanan. Sumber Daya Manusia merupakan asset yang berpotensi dalam peningkatan kualitas pelayanan KB di Mentawai.
- Menambahkan jadwal kunjungan / konsultasi KB. Adanya peningkatan intensitas kunjungan penyuluh KB ke masyarakat akan meningkatkan pengetahuan kader

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD. PPKBD dapat berbagi informasi mengenai kendala dan permasalahan di lapangan. Sehingga akan mendapatkan solusi penyelesaian dengan cepat.

2. Strategi S-T

- a. Menambah media sosialisasi KB. Masyarakat tidak dapat bertemu dengan penyuluh KB setiap saat karena sudah ditetapkan jadwal pertemuan. Untuk meningkatkan ritme sosialisasi KB maka ditambahkan media seperti spanduk, *flyer*, dan poster. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan KB juga dapat melakukan komunikasi dengan menghubungi Penyuluh KB dan PPKBD melalui jaringan telepon seluler.
- b. Melakukan pendekatan persuasif terhadap *Sikerei* (Ketua Adat) untuk penerapan KB. *Sikerei* menjadi kunci dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Oleh karenanya Dinas PMDP2KB Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan pendekatan secara non formal terhadap *Sikerei*. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadikan kegiatan-kegiatan masyarakat adat sebagai kegiatan rutin daerah. Pola pendekatan seperti ini akan mendekatkan hubungan antara *Sikerei*, masyarakat adat dan pemerintah daerah. Pemertahanan adat lokal yang dilakukan pemerintah daerah juga meningkatkan derajat dan kedudukan *Sikerei*. Adanya kedekatan tokoh masyarakat dengan pemerintah daerah tentunya akan memudahkan penyampaian program-program pemerintah. Jika pendekatan terhadap *Sikerei* tidak berhasil dilaksanakan, tentunya akan menghambat pelaksanaan program KB di Mentawai.

3. Strategi W-O

- a. Meningkatkan kapasitas aparatur penyuluh KB. Keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat peningkatan kapasitas aparatur. Hal ini juga dipengaruhi oleh letak geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terpisah dari Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat. Sementara Diklat dan Bimtek lebih cenderung diselenggarakan di Kota Padang. Sehingga Dinas PMDP2KB Kabupaten Kepulauan Mentawai menerapkan metode *coaching* dan *mentoring*. Setiap aparatur yang telah mengikuti diklat atau bimtek mempunyai kewajiban untuk berbagi pengetahuan kepada setiap aparatur lainnya. Sehingga setiap aparatur mempunyai informasi dan pengetahuan yang merata.
- b. Menambahkan kader relawan KB. Penambahan kader relawan KB akan meningkatkan penyebaran informasi mengenai program KB. Masyarakat akan lebih

mudah menerima keberadaan program KB jika yang menyampaikannya adalah kerabat dari masyarakat itu sendiri.

4. Strategi W-T

- a. Menyediakan Boat Pelayanan milik Pemerintah Daerah. Dengan memiliki fasilitas transportasi milik sendiri, akan memudahkan pelaksanaan tugas penyuluh KB. Ketersediaan Boat Pelayanan mengurangi biaya operasional dan dapat menambah jumlah petugas penyuluh KB yang akan ke lapangan.
- b. Melakukan sosialisasi secara intensif. Seiring dengan bertambahnya intensitas kunjungan penyuluh KB, kegiatan sosialisasi juga ditingkatkan. Hal ini untuk meminimalisir kelemahan pandangan masyarakat yang belum mau menerima keberadaan program KB.

Analisis Strategi Peningkatan Partisipasi Keluarga Berencana

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menghadapi tantangan dalam pelaksanaan program KB di masyarakat. Tantangan yang dihadapi adalah terbatasnya aparatur pelaksana program KB, terbatasnya anggaran, serta kondisi geografis kepulauan. Pelayanan KB idealnya diberikan di berbagai unit pelayanan baik oleh pemerintah maupun swasta dari tingkat desa hingga tingkat kota dengan kompetensi yang sangat bervariasi. Pemberi layanan KB antara lain adalah rumah sakit, puskesmas, dokter praktek swasta, bidan praktek swasta dan bidan desa.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melaksanakan strategi peningkatan partisipasi KB melalui Dinas PMDP2KB. Dinas PMDP2KB menerapkan inovasi dengan meluncurkan Program Bona Keren Jelita dalam mengentaskan program KB. Bona Keren Jelita merupakan singkatan dari Boat Pelayanan Keluarga Berencana Jemput Langsung Alamat. Dinas PMDP2KB menyelenggarakan pelayanan berkala pemasangan alat kontrasepsi dengan menggunakan transportasi laut. Karena tidak semua desa dapat dilalui dengan menggunakan alat transportasi darat. Selain pelayanan pemasangan alat kontrasepsi, Dinas PMDP2KB juga melaksanakan sosialisasi program Keluarga Berencana. Pada tahun 2018 program KB mampu menjangkau keseluruhan 43 desa pada Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di tahun-tahun sebelumnya petugas penyuluh KB sangat bergantung pada moda transportasi umum. Aktifitas kerja sangat bergantung pada kondisi cuaca dan alam. Jika cuaca sedang kurang baik seperti badai dan ombak tinggi, maka secara praktis pelayanan

KB kepada masyarakat terhenti. Sementara pelayaran kapal lainnya harus menunggu jadwal selanjutnya.

Keberadaan Bona Keren Jelita akan memudahkan petugas penyuluh KB dalam melaksanakan pelayanan. Petugas hanya perlu menunggu beberapa hari saja hingga cuaca dan kondisi pelayaran memungkinkan. Adapun kegiatan yang telah ditentukan tetap dapat dilaksanakan sesuai jadwal tanpa harus menunggu ketersediaan jadwal pelayaran kapal penumpang umum. Bona Keren Jelita mendekatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam pelayanan program KB. Keberadaan Bona Keren Jelita juga mengurangi biaya untuk operasional penyuluhan KB. Petugas penyuluh KB dapat melakukan pelayanan ke beberapa desa yang berdekatan secara sekaligus. Hadirnya Bona Keren Jelita membuat penyuluh KB lebih leluasa dalam menjangkau desa-desa yang sulit dijangkau. Pola jemput bola ini dinilai efektif dalam pelayanan masyarakat. Bona Keren Jelita turut mendukung peningkatan kegiatan supervisi fasilitatif dan sistem monitoring serta evaluasi pelayanan KB. Masyarakat jadi lebih sadar dan peduli akan kesehatan serta mengetahui adanya Program KB.

Saat ini angka partisipasi pria dalam penggunaan alat kontrasepsi di Indonesia masih sangat rendah yaitu hanya 2,1% peserta KB pria dan mereka umumnya memakai kondom. Persentase tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Iran 12%, Tunisia 16%, Malaysia 9-11%, bahkan di Amerika Serikat mencapai 32%. Sangat sedikit pria yang mau menggunakan alat kontrasepsi baik kondom maupun vasektomi, dari total jumlah akseptor KB di Indonesia, sekitar 97% adalah perempuan. Oleh sebab itu sosialisasi program KB dikalangan pria harus ditingkatkan ([Ernawati, 2016](#)). Rendahnya partisipasi pria disebabkan oleh:

1. Terbatasnya jenis metode kontrasepsi bagi pria;
2. Kurangnya dukungan untuk pengembangan metode kontrasepsi pria;
3. Rendahnya pengetahuan suami isteri tentang hak-hak reproduksi;
4. Kurangnya pengetahuan suami tentang keluarga berencana;
5. Lingkungan sosial budaya menganggap bahwa keluarga berencana dan kesehatan reproduksi merupakan urusan perempuan;
6. Terbatasnya informasi dan aksesibilitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bagi pria ([Bunyamin, 2015](#)).

Para petugas KB di Mentawai membutuhkan strategi khusus dalam pendekatan kepada masyarakat karena program KB belum membudaya di masyarakat. Untuk memudahkan penyampaian informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat, maka dibutuhkan kader

KB yang berasal dari kalangan masyarakat itu sendiri. Pola pikir masyarakat akan lebih terbuka dan mau menerima perubahan yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Petugas KB juga melakukan peningkatan peran motivator KB terutama pada program KB Pria dalam sosialisasi, promosi, penyuluhan, penggerakan dan konseling. Adanya fenomena bahwa masyarakat lebih percaya kepada *Sikerei* atau tokoh adat, dibutuhkan strategi pendekatan secara khusus.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh ([Mawarni, 2022](#)) bahwasanya dukungan dari tokoh masyarakat sangat berpengaruh terhadap keikutsertaan masyarakat sebagai akseptor KB. Tingkat pengetahuan dan pendidikan dari perangkat desa harus baik dan tinggi, hal ini dikarenakan peran tokoh masyarakat seperti perangkat desa sangatlah penting. Tokoh masyarakat merupakan titik sentral dalam perwujudan desa yang baik sangat dibutuhkan guna mengembangkan desa. Peran tokoh masyarakat berkaitan erat dengan aktifitas sosialisasi dan komunikasi dua arah. Peranan tokoh masyarakat dalam sosialisasi sangatlah penting untuk mempengaruhi, menggerakan keterlibatan seluruh warga, dan memberi contoh di lingkungannya untuk mendukung keberhasilan program. Peran tetua adat, kepala desa, dan tokoh masyarakat lain masih sangat efektif sebagai komunikator.

Kondisi ini terbukti dari masyarakat yang masih sangat loyal dan taat kepada nilai-nilai yang penerapannya masih dijaga oleh kepala desa, dusun, adat, atau tokoh masyarakat lain. Sebagai perbandingan, di Baduy sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 trend untuk menjadi akseptor KB bagi perempuan sangat massif, karena KB tidak lagi dianggap sebagai larangan adat ([Sihabudin et al., 2018](#)). Hal ini dapat dikatakan bahwasanya sudah banyak juga terjadi pergeseran nilai di Baduy, dengan harapan tentunya pergeseran ini ke arah lebih baik dalam kesejahteraan. KB bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk peningkatan kesejahteraan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan kolaborasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan masyarakat adat. Di Mentawai terdapat Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membahas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang holistik, tematik spasial dan integratif. Forum OPD merupakan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pembahasan kolaborasi kegiatan diselenggarakan melalui Forum OPD.

Dinas PMDP2KB melaksanakan kaderisasi pada program KB. Hal ini dilaksanakan untuk mengantisipasi kekurangan sumber daya manusia PLKB. Kaderisasi KB tidak hanya melibatkan masyarakat secara umum. Pemerintah Daerah juga melibatkan TNI Polri dalam kegiatan bakti sosial dalam rangka peningkatan manunggal KB dan kesehatan masyarakat. Semakin bertambahnya jumlah kader KB akan meningkatkan jumlah partisipasi KB di masyarakat. Adanya penambahan intensitas kunjungan penyuluh KB ke lapangan, turut mendorong peningkatan pengetahuan dan kemampuan para kader KB. Penyuluh KB dapat menyampaikan informasi tentang pemilihan alat kontrasepsi secara intensif. Penyuluh KB juga menyampaikan metode-metode komunikasi kepada masyarakat dengan cara yang kreatif.

Metode komunikasi yang kreatif dapat diterapkan oleh setiap kader KB di Mentawai. Kader KB akan mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang didapatkan di lapangan. Penyuluh KB juga dapat menyampaikan cara-cara yang paling efektif untuk mengkomunikasikan tentang perencanaan keluarga berencana. Penyuluh KB juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan mendampingi bimbingan konseling secara langsung kepada masyarakat.

Bona Keren Jelita selain menjadi fasilitas pendukung KB, juga dapat menjadi pendukung kebutuhan administratif masyarakat. Masyarakat dapat menitipkan dokumen administrasi kependudukan pada kapal milik pemerintah daerah.

PENUTUP

Implementasi kebijakan program Keluarga Berencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai menghadapi berbagai tantangan. Tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, geografis daerah berbentuk kepulauan, pola pikir masyarakat yang belum sepenuhnya menerima program KB. Dinas PMDP2KB menerapkan strategi dalam upaya menghadapi tantangan tersebut. Upaya ini juga dilaksanakan dalam rangka peningkatan partisipasi Keluarga Berencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Upaya-upaya yang dilaksanakan adalah: (1) Kaderisasi Program KB, (2) Penerapan inovasi Bona Keren Jelita, (3) Pelibatan tokoh masyarakat adat dalam program KB. Pada tahun 2018 program KB mampu menjangkau keseluruhan wilayah 43 desa pada Kabupaten Kepulauan Mentawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Allison, M. (2013). [Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.](https://books.google.co.id/books/about/Perencanaan_Strategis_Bagi_Organisasi_Nirlaba_Yayasan_Pustaka_Obor_Indonesia.html?id=9DyTNwAACAAJ&redir_esc=y)
https://books.google.co.id/books/about/Perencanaan_Strategis_Bagi_Organisasi_Ni.html?id=9DyTNwAACAAJ&redir_esc=y
- Amalini, M. P. (2019). [STRATEGI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASOINAL \(BKKBN\) DALAM MENINGKATKAN PENGGUNA PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KOTA SAMARINDA](#). 7(3), 1379–1390.
- Bunu, H. Y., & Windia, W. (2018). [RESISTENSI DAERAH TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA](#). 1.
- Bunyamin, B. (2015). [Isu Gender Dalam Program Keluarga Berencana. Jurnal Paralela](#), 1(2), 151–158.
- Cresswell, J. W. (2014). [Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. \(Fourth Edi\)](#). Sage Publication Inc.
- Ernawati, S. (2016). [Faktor yang Memengaruhi Keluarga Berencana \(KB\) Pria dengan Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana di Wilayah Kerja Puskesmas Sedayu II. Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia](#), 4(2), 109.
[https://doi.org/10.21927/jnki.2016.4\(2\).109-116](https://doi.org/10.21927/jnki.2016.4(2).109-116)
- Makmur. (2009). [Teori Manajemen Strategik Dalam Pemerintahan dan Pembangunan](#). PT Reflika Aditama.
- Mardikanto, Totok; Soebiato, P. (2013). [Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik \(Revisi\)](#). Alfabeta.
- Marrone, G., Abdul-Rahman, L., De Coninck, Z., & Johansson, A. (2014). [Predictors of contraceptive use among female adolescents in Ghana](#). *African Journal of Reproductive Health*, 18(1).
- Mawarni, G. N. (2022). [STRATEGI BKKBN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM KELUARGA BERENCANA](#). Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Nawawi, H. (2014). [Manajemen Strategik: Organisasi NonProfit Bidang Pemerintahan](#). Gadjah Mada University Press.
- Nurjannah, S. N., & Susanti, E. (2018). [Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana \(Kb\) di Kabupaten Kuningan Tahun 2018 \(Studi Kuantitatif Dan Kualitatif\)](#).

- Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 9(2), 27–33.
<https://doi.org/10.34305/jikbh.v9i2.64>
- Pasrah, Rosa; Putro, Tri Sukirno; Indrawati, T. (2014). [Efektivitas program keluarga berencana dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru](#). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Riau*, 1(2), 318–344.
- Rangkuti, F. (2014). [Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis](#). PT. Gramedia Pustaka Utama. <https://doi.org/979-605-718-2>
- Sangkala. (2013). [Innovative Governance](#). Capiya Publishing.
- Setiawan, E. H. (2013). [EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DESA SESULU KECAMATAN WARU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA](#). *EJournal Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Mulawarman*, 1 (2), 784–796.
- Sihabudin, A., Mutjaba, B., & Dimiyati, I. (2018). [Adopsi Inovasi Program Keluarga Berencana oleh Akseptor dari Komunitas Adat Terpencil Baduy di Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak](#). *Jurnal Penyuluhan*, 14(1), 175–188.
<https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v14i1.15620>
- Sjafrizal. (2009). [Teknik Praktis Penyusunan Perencanaan Pemerintah Daerah](#). Baduose Media.
- Suharsono. (2013). [Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisa Kebijakan](#). UNY Press.
- Sulistyawati, A. (2013). [Pelayanan Keluarga Berencana](#) (Edisi ke 3). Salemba Medika.
- Widya Saputra, Y., Susmei Rindantya Prodi Pendidikan Geografi Universitas Mulawarman, R., & Timur, K. (2019). [Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana \(KB\) di Kota Samarinda](#). *Jurnal Georaffesia Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi*, 4, 186–200.